

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bintarto, 1883, *Interaksi desa-kota dan permasalahannya*, Ghalia Indonesia, Jakarta,.
- Chomzah, Ali Achmad, *Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia) Jilid 1*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2004.
- Gani, Abdul dan Wahyono, 1986, *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini*, Galia Indonesia, Jakarta.
- Harsono Boedi, 2003, *hukum agraria indonesia, sejarah pembentukan undang-undang pokok agraria, isi dan pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta,
- Harsono, Budi, 2005, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Hasni. 2010. *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah Edisi kedua*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum* , Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Nazir, 1988, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm.63
- Iqbal Muhammad S, 2007, “*Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Bertumpu Pada Partisipasi Masyarakat*” Analisis kebija
- Muchsin dan Imam Koeswahyono. 2008. *Aspek Kebijaksanaan Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang*. Sinar Grafika, Jakarta
- Raharjo, Budi, 2004, *Kota Berwawasan Lingkungan*, Pranada Media. Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2011, *Perundang-undangan Agraria Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 3
- Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta,
- Sumardjono Maria S.W, 1993, “*Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian Menjadi Lahan Non Pertanian Di Provinsi DIY Tahun 1983- 1987*”, Artikel Pada Jurnal *Mimbar Hukum* No.17 Vol. IV, 1994.
- Supriadi, 2008, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Susanto, Urip, 2005, “*Hukum Agraria dan Hak-Hak atas Tanah*”, Kencana, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit

Universitas Indonesia, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Madmuji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 88.

Soemitro, Hanitijo dan Ronny, 1985, *Beberapa Masalah Dalam Studi Hukum dan Masyarakat*, CV. Remadja Karya, Bandung, hlm. 1

Umar Said Sugiharto (dkk), 2015, *Hukum Pengadaan Tanah (Pengadaan Hak Atas Tanah Kepentingan Umum Pra dan Pasca Reformasi)*, Setara Press, Malang.

Urip Santoso, 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta.

Urip Santoso, 2012, *Hukum Penataan Ruang*, Airlangga University Press, Surabaya.

Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta.

B. Jurnal, Penelitian, Skripsi, Tesis

Debby, Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Menjadi Non Pertanian Di Kelurahan Kauman, Purbosuman, dan Tonatan Kecamatan Ponorogo Tahun 2010- 2014, *Skripsi*, FH.UGM, 2016

Devi Rahmawati Salma, Penguasaan Tanah Kawasan Industri (Studi Kasus Kawasan Industri Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah), *Skripsi*, FH.UGM. Ezar Maulana 2016, Prinsip Fungsi Sosial Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kawasan Industri di Kabupaten Kendal, *Skripsi*, FH Universitas Negeri Semarang, 2019

Dwi, Studi Kebijakan Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Lahan Non Pertanian di Kabupaten Bantul , *Skripsi*, FH.UGM, 2016.

C. Reverensi Internet

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Proyek Strategis Nasional, www.bpkp.go.id/jateng/konten/2688/PROYEK-STRATEGIS-NASIONAL-PSN. doakses 12 September 2019, Pukul. 16.51 WIB

Portal Resmi Kab. Sukoharjo. 2015, Potensi dan Peluang Investasi di Kabupaten Sukoharjo, <http://sukoharjokab.go.id/v2/id/p/potensi-dan-investasi>, diakses 17 September 2019, Pukul 14.49 WIB

Hukumproperti.com, *Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri Dan Izin Perluasan Kawasan Industri*, <http://www.hukumproperti.com/perijinan/tata-cara-pemberian-izin-usaha->



[kawasan-industri-dan-izin-perluasan-kawasan-industri/](#) , diakses 2 Juli 2019, Pukul 01.04 WIB

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus dalam versi online*.
<https://kbbi.web.id/tanah>, diakses 21 Desember 2019, Pukul 10.29 WIB

Kementrian Perindustrian, “*Luas Minimal Kawasan Industri Baru 1000Ha*”,
<https://kemenperin.go.id/artikel/6365/Luas-Minimal-Kawasan-Industri-Baru-1.000-Ha>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2019, Pukul 10.37 WIB.

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;

Undang-Undang No.2 Tahun 2014 Jo. UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri;

Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri;

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri;

Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana kawasan industri;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Jo. PP No.37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2013;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang



Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2037;

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031;

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 67 tahun 2011 tentang Izin Pemanfaatan Ruang;

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 28 tahun 2016 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penerbitan izin Usaha Industri.